

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Akhmad Basori, A. (2016). *Buku kerja sistem keuangan Desa*. BPKP.
[https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Buker_Sistem%20Keuangan%20Desa_2016%20\(1\).pdf?msclkid=eff3744fd0d311ec817317c17fc7b7db](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Buker_Sistem%20Keuangan%20Desa_2016%20(1).pdf?msclkid=eff3744fd0d311ec817317c17fc7b7db)
- Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2018). *Manfaat Dana Desa Di Provinsi Jawa Tengah*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta.
- SDGs Desa. (2021). SDGs Desa – Desa untuk semua warga.
<https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-des-2/>